

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum pernyataan tersebut tertuang dalam UUD 1945. Oleh karena itu, negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negaranya, salah satu kewajiban dari warga negara ialah membayar pajak. Pajak yang dipungut dari masyarakat dipakai untuk mengatur setiap pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan demi terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan umum agar dapat dinikmati bersama.

Dalam definisinya, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pernyataan tersebut tertuang dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Menurut lembaga yang melaksanakan pemungutan pajak dapat dibedakan dalam dua jenis lembaga pemungut yaitu pajak daerah dan pajak pusat. pajak daerah merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sedangkan Pajak pusat merupakan pajak yang pungutannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Pajak sebagai instansi pemungutnya. pajak penghasilan (PPh) merupakan bagian dari pajak pusat.

Pada pelaksanaannya sistem pemungutan perpajakan Indonesia menganut *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh dalam penghitungan, pembayaran serta pengungkapan pajak yang harus dibayar berdasarkan aturan dibidang perpajakan. Jadi meskipun wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dalam menghitung sendiri kewajiban perpajakannya, wajib

pajak harus tetap mematuhi kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

KPP Pratama Tobelo merupakan kantor pelayanan yang memberikan pelayanan, konsultasi, pemeriksaan, dan penegakan hukum pajak di bidang perpajakan.

Salah satu fungsi dan tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo adalah melakukan pemeriksaan dibidang perpajakan. Terdapat prosedur dalam melaksanakan pemeriksaan dalam hal menguji kepatuhan dari Wajib Pajak (WP)

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan adalah rangkaian tahapan pada suatu teknik pemeriksaan, dalam bentuk instruksi rinci yang umumnya ditulis secara berurutan, untuk dilakukannya pemeriksaan. (SE-65/PJ/2013). Dengan adanya prosedur diharapkan pemeriksaan yang dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan undang-undang KUP, Wajib Pajak Badan adalah kumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang menjalankan usaha maupun tidak. Dalam Pelaksanaannya pemeriksaan pajak penghasilan badan dihitung berdasarkan tahun pajak ataupun masa pajak.

Dalam menguji kepatuhan dari wajib pajak, pemeriksaan pajak bisa dilakukan di kantor, yang biasa disebut dengan pemeriksaan kantor. dan apabila pelaksanaannya dilakukan di tempat usaha dan tempat tinggal dari wajib pajak, yang berhubungan dengan kegiatan bisnis wajib pajak disebut dengan pemeriksaan lapangan. Dalam prosedur pelaksanaan pemeriksaan tidak semua wajib pajak dilakukan pemeriksaan, karena terdapat kriteria tertentu pada saat dilakukan pemeriksaan. pemeriksaan dapat dilakukan jika terdapat indikasi, bahwa orang yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak yang terutang tetapi, tidak melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan aturan atau prosedur yang ada. oleh karena itu penulis mengangkat judul mengenai bagaimana prosedur dalam pemeriksaan pajak serta tentang Pajak Penghasilan badan.

Pajak penghasilan khususnya badan juga memiliki potensi besar untuk penerimaan negara. Untuk itu diperlukan pemeriksaan agar kepatuhan serta kesadaran akan pajak di tahun-tahun berikutnya dapat meningkat.

sesuai uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul:

“PROSEDUR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TOBELO”

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap PPh Badan di KPP Pratama Tobelo apakah sesuai dengan aturan yang berlaku?
- Bagaimana Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap PPh Badan di KPP Pratama Tobelo?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap PPh Badan apakah sudah sesuai dengan peraturan atau tidak
- Untuk mengetahui bagaimana hasil dari Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap PPh Badan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat praktek kerja lapangan di KPP Pratama Tobelo yaitu:

- **Bagi Penulis**

Menambah pengetahuan mengenai Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap PPh Badan di KPP Pratama Tobelo

- **Bagi Instansi**

Agar melaksanakan prosedur pemeriksaan sesuai SOP dengan peraturan yang ada

- **Bagi Pembaca**

Mendapatkan pengetahuan serta informasi tentang prosedur pelaksanaan pemeriksaan terhadap PPh Badan di KPP Pratama Tobelo

1.5 Ruang Lingkup Laporan Praktek Kerja Lapangan

Penulis memberikan Batasan pada penulisan LPKL agar penyusunan LPKL lebih terarah sesuai dengan judul penulisan LPKL yaitu tentang Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap PPh Badan di KPP Pratama Tobelo

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari Laporan Praktek Kerja Lapangan atau Magang, maka penulis membaginya dalam 5 bab di mana setiap bagian bab dipisahkan menjadi beberapa sub-bab yang memberikan penjelasan secara terperinci dari setiap topik yang dibahas. Berikut ini merupakan uraian secara umum dari setiap bab

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini penulis membahas tentang rumusan masalah, latar belakang dari dipilihnya judul dalam Karya Tulis Ilmiah Akhir, ruang lingkup pembahasan dan tujuan dari dibuatkannya penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membahas tentang Pustaka atau serangkaian definisi terkait dengan topik atau masalah dalam penelitian yaitu tentang Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap PPH Badan Di KPP Pratama Tobelo

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis memberikan penjelasan terkait metode yang dipakai serta tinjauan umum dari instansi yang terdiri dari visi misi, Struktur organisasi, sejarah singkat KPP, dan uraian atau tugas

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap PPh Badan Di KPP Pratama Tobelo

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis menguraikan kesimpulan maupun saran terkait pembahasan yaitu tentang Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap PPh Badan Di KPP Pratama Tobelo

